

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Sistem ini dianggap paling relevan dengan dasar negara yang diterapkan di Indonesia, mengingat keberagaman suku, budaya, dan bahasa yang dimiliki. Dalam konteks Pancasila, demokrasi berarti bahwa setiap individu dari latar belakang apa pun memiliki hak yang sama untuk didengarkan dan dihormati.¹ Konsep demokrasi ialah tentang rakyat yang berkuasa. Dalam bahasa Yunani, demokrasi berasal dari kata *demos* yang berarti rakyat, *kratos/kratein* yang berarti kekuasaan, di mana demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan memungkinkan mereka berpartisipasi dalam perumusan kebijakan melalui wakil-wakil yang dipilih.²

Dengan demikian di dalam demokrasi rakyat diberi izin untuk dapat berpartisipasi baik secara langsung maupun melalui perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Makna lain dari demokrasi adalah tentang bagaimana kekuasaan yang dimiliki oleh rakyat mampu menghasilkan aturan yang menguntungkan dan bisa melindungi hak-hak rakyat.³

Demokrasi sebagai sistem pemerintahan menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, di mana keputusan politik harus mencerminkan

¹ Dany Try Utama Hutabarat dkk., "Makna Demokrasi Pancasila," *Journal of Humanities, Social Sciences, and Business (JHSSB)*, vol. 1, no. 1, 2021, hlm. 60.

² Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 105.

³ Cora Elly Noviati, "Demokrasi dan Sistem Pemerintahan," *Jurnal Konstitusi*, vol. 10, no. 2, 2013, hlm. 334.

kehendak masyarakat. Dalam praktiknya, sistem demokrasi modern tidak dapat berjalan tanpa mekanisme perwakilan, mengingat kehidupan bernegara dan rakyat yang memiliki keterbatasan untuk terlibat langsung dalam pemerintahan. Oleh karena itu, pemilihan umum (Pemilu) menjadi instrumen utama dalam menyalurkan aspirasi rakyat serta menentukan pemimpin yang berhak menjalankan roda pemerintahan. Pemilu merupakan sarana untuk mewujudkan pemerintahan yang sah dan memiliki legitimasi berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi.⁴

Pemilu harus diselenggarakan dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL) agar dapat benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat secara murni. Sebagai bagian dari sistem demokrasi perwakilan, pemilu di Indonesia memiliki sejarah panjang dalam menyesuaikan diri dengan kebutuhan politik dan sosial masyarakat. Sejak awal pelaksanaannya, pemilu bertujuan untuk memilih wakil rakyat yang dapat menjalankan fungsi legislatif dan eksekutif secara efektif. Dalam hal ini, setiap pemilu tidak hanya menjadi ajang kontestasi politik, tetapi juga menjadi momen evaluasi bagi partai politik dan kandidat dalam memenuhi aspirasi rakyat.⁵

Pemilihan Legislatif (Pileg) yang merupakan bagian dari pemilu memiliki peranan penting dalam mewakili aspirasi rakyat di lembaga legislatif, dan menjadi medan persaingan bagi calon anggota dewan baik di tingkat nasional maupun daerah untuk mendapatkan kursi di parlemen. Selain sebagai proses legalitas kekuasaan, pemilu juga berfungsi sebagai mekanisme politik yang menentukan

⁴ Didik S., 2009, *Menggagas Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 12.

⁵ *Ibid.*, hlm 17.

arah pemerintahan, serta menjadi momen evaluasi terhadap partai politik dan calon legislatif dalam memenuhi aspirasi rakyat.⁶

Pemilihan legislatif sering disebut juga sebagai kontestasi politik, tentunya ini menjadi medan persaingan bagi para calon untuk mendapatkan kursi di parlemen, baik di tingkat nasional maupun daerah.⁷ Pada kontestasi politik, setiap calon legislatif dituntut untuk mampu menunjukkan kapasitas serta kekuatan yang dimiliki. Salah satu aspek krusial yang menentukan keberhasilan dalam pemilu adalah kepemilikan modal. Pierre Bourdieu mengelompokkan modal ke dalam empat kategori utama: modal ekonomi (yakni berupa sumber daya finansial), modal budaya (meliputi pendidikan, keterampilan, dan pengalaman), modal sosial (berupa jaringan relasi), serta modal simbolik (seperti reputasi, kehormatan, dan nama besar). Keempat jenis modal tersebut saling berkelindan dan dapat saling dikonversi. Pada ranah politik, modal tidak hanya berfungsi sebagai sumber daya, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk memengaruhi persepsi publik dan memperoleh dukungan elektoral.⁸

Modal tidak bersifat kaku atau berdiri sendiri. Tugba Basaran dan Christian Olsson menjelaskan bahwa modal simbolik seperti status sosial, afiliasi institusional, atau reputasi dapat dikonversi menjadi modal sosial apabila berhasil memperoleh pengakuan dari masyarakat. Dalam konteks politik, konversi ini

⁶ *Ibid.*, hlm 21.

⁷ Muhammad Solikhudin, A. Fauzi Aziz, Muhammad Jazil Rifqi, Moh. Faizur Rohman., 2024, *Kontestasi dan Dinamika Pemilihan Umum dalam Negara Demokratis*, Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kediri, hlm. 12.

⁸ Giscka Canna Indira S, Chusnul Mariyah. 2021. Analisis Modal Politik, Sosial, Dan Ekonomi Terhadap Keterpilihan Caleg Perempuan Pemula Pada Pileg DPRD DKI Jakarta 2019. *TheJournalish: Social and Government*. 2(2). hlm 60.

tampak ketika status sebagai bagian dari *elite*, keturunan tokoh berpengaruh, atau citra sebagai sosok terdidik digunakan untuk membangun jejaring, memperkuat legitimasi, dan memperoleh kepercayaan publik. Dengan kata lain, simbol-simbol tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperluas jaringan sosial yang bermanfaat secara politik. Proses konversi ini sangat bergantung pada konteks sosial dan persepsi masyarakat, sehingga status simbolik dapat menjadi kekuatan riil dalam kontestasi elektoral jika dikelola dengan tepat.⁹

Dalam kontestasi politik, modal simbolik dapat dikonversi menjadi modal sosial ketika reputasi atau pengaruh yang dimiliki seseorang dimanfaatkan untuk membangun jaringan relawan, memperluas dukungan, dan menarik simpati pemilih. Konversi ini menjadikan modal simbolik tidak hanya sebagai citra, melainkan sebagai kekuatan sosial yang bekerja secara nyata dalam proses politik elektoral.¹⁰

Penelitian ini menyoroti proses konversi modal simbolik menjadi modal sosial sebagai elemen kunci dalam strategi kemenangan politik. Modal simbolik seperti status keluarga, afiliasi sosial, dan citra sebagai bagian dari *elite* digunakan oleh Muhammad Iqra Chissa untuk membentuk jaringan sosial, membangun kepercayaan masyarakat, dan memperluas pengaruh politiknya. Proses ini menjadi penting untuk dianalisis karena belum banyak penelitian yang secara spesifik mengkaji bagaimana status simbolik seseorang dapat dimobilisasi menjadi

⁹ Tugba Basaran dan Christian Olsson, 2017, , *Becoming International: On Symbolic Capital, Conversion and Privilege*, *Millennium: Journal of International Studies*, Vol. 46(1), hlm. 3–5.

¹⁰ *Ibid.*

kekuatan sosial-politik yang konkret dalam kontestasi pemilu legislatif tingkat daerah, khususnya di Sumatera Barat.

Menurut Edward Aspinall, kekuasaan politik di Indonesia kerap dijalankan melalui jalur informal seperti relasi personal, patron-klien, dan ikatan keluarga, yang dalam banyak kasus lebih efektif dibandingkan struktur formal partai. Oleh karena itu, kekuatan politik calon legislatif tidak hanya ditentukan oleh kedudukan struktural dalam partai, tetapi juga oleh kemampuannya dalam mengaktivasi jejaring informal yang luas dan berpengaruh. Dalam konteks ini, strategi politik Muhammad Iqra Chissa memanfaatkan hubungan personal, koneksi sosial, serta dukungan non-struktural untuk memperluas pengaruhnya dan memperoleh legitimasi di tingkat akar rumput.¹¹

Membahas mengenai kepemilikan modal, Pierre Bourdieu menyatakan kepemilikan modal merupakan sumber kekuatan untuk memengaruhi orang lain. Dalam pemilu legislatif, hal ini tercermin dalam bagaimana sumber daya yang dimiliki kandidat atau partai politik dapat memengaruhi hasil pemilihan. Kemampuan untuk mengontrol sumber daya kampanye dan membangun pengaruh di kalangan pemilih menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan kandidat meraih kursi legislatif.¹² Dengan demikian, peneliti nantinya akan melihat bagaimana berbagai bentuk modal yang dimiliki oleh Muhammad Iqra Chissa Putra berkontribusi terhadap keberhasilannya meraih kursi di kontestasi Pemilu Legislatif (DPRD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2024.

¹¹ Edward Aspinall, 2013, *Popular Agency and Interests in Indonesia's Democratic Transition*, Cambridge: Cambridge University Press, hlm. 25.

¹² Pierre Bourdieu, "The Forms of Capital," dalam J. G. Richardson (ed.), *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education* (New York: Greenwood Press, 1986), hlm. 241.

Kajian tentang modal di bidang politik telah banyak dilakukan sebelumnya dan menjadi referensi penting dalam penelitian ini. Di antaranya, Dessy RamaDhanni dan Dian Eka Rahmawati (2020)¹³, A. Mbolang, F.B. Tokan, dan V. I A. Boro (2020)¹⁴, Bias Fajar Lagabuana, Sukri, dan Haryanto (2021)¹⁵, Erin Yunita, Ahmad Syukri, dan Sirajudin Fikri (2022)¹⁶, dan Ariq Aqshal Alfaridzy Heriyanto dan Ratnia Solihah (2020)¹⁷. Berbagai penelitian ini memberikan landasan teoritis dan empiris yang relevan untuk memahami dinamika modal dalam konteks pemilihan umum.

Berdasarkan penelitian terdahulu, kajian mengenai modal politik umumnya menyoroti pemanfaatan modal sosial, ekonomi, politik, dan budaya dalam strategi pemenangan, seperti keterwakilan perempuan, pengaruh jaringan sosial, serta peran partai dan sumber daya ekonomi. Secara umum, fokus penelitian-penelitian tersebut masih menempatkan modal sosial dan ekonomi sebagai faktor utama keberhasilan elektoral.

Penelitian ini hadir dengan perspektif baru, yakni menganalisis konversi modal simbolik menjadi modal sosial dalam Pemilihan Legislatif DPRD Provinsi

¹³ Dessy RamaDhanni dan Dian Eka Rahmawati, 2020, Modal Caleg Perempuan dan Politik Patriarkhi dalam Pemilihan Umum di Indonesia: Keterwakilan Perempuan pada Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Universitas Indonesia, hlm. 49.

¹⁴ A. Mbolang, F.B. Tokan dan V. I A. Boro, 2020, Modalitas Sosial Politik: Studi Kasus Kemenangan Ferdinandus Mazmur (FM) pada Pemilu Legislatif di Dapil V Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019, *Warta Governare: Jurnal Pemerintahan*, Vol. 1 No. 2, hlm. 185.

¹⁵ Bias Fajar Lagabuana, Sukri, dan Haryanto, 2021, Bertahan dan Menang: Strategi dan Modal Politik Sri Rahmi dalam Pemilihan Legislatif 2004-2019 di Sulawesi Selatan, *Jurnal Transformatif*, Vol. 7 No. 2, hlm. 6.

¹⁶ Erin Yunita, Ahmad Syukri, dan Sirajudin Fikri, 2022, Modal Politik Keterwakilan Evy Susanti Sebagai Anggota Legislatif Kota Prabumulih Periode 2019-2024, *Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization*, Vol. 3 No.3, hlm. 186.

¹⁷ Ariq Aqshal Alfaridzy Heriyanto dan Ratnia Solihah, 2020, Strategi Pemanfaatan Modal Politik Dan Modal Sosial Calon Anggota Legislatif Menghadapi Pemilu Legislatif 2024, *Jurnal Ilmiah Moqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, hlm. 363.

Sumatera Barat tahun 2024. Melalui studi kasus Muhammad Iqra Chissa Putra, penelitian ini menekankan bagaimana reputasi, citra diri, dan pengakuan publik sebagai modal simbolik dapat diubah menjadi jejaring dukungan sosial yang konkret. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis proses transformasi simbol menjadi kekuatan sosial dalam praktik politik lokal.

1.2 Rumusan Masalah

Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) merupakan wujud kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi perwakilan di Indonesia, termasuk di tingkat Provinsi Sumatera Barat. Pemilihan legislatif tahun 2024 menjadi arena kontestasi penting bagi para calon anggota legislatif untuk meraih kursi di DPRD Provinsi Sumatera Barat. Dalam persaingan tersebut, para calon mengerahkan berbagai strategi dan memanfaatkan beragam bentuk modal, seperti jaringan sosial, sumber daya ekonomi, reputasi, maupun latar belakang pendidikan yang berperan penting dalam menentukan keberhasilan elektoral.

Partai politik merupakan salah satu pemegang peran strategis sebagai wadah distribusi dan artikulasi modal para calon legislatif. Posisi partai dalam peta kekuatan elektoral menjadi salah satu faktor penentu dalam keberhasilan kandidat, termasuk dalam hal dukungan, jaringan, dan legitimasi. Salah satu partai yang patut diperhatikan dalam kontestasi ini adalah Partai Golongan Karya (Golkar). Partai ini memiliki sejarah panjang dalam perpolitikan Indonesia dan terus berupaya mempertahankan pengaruhnya di berbagai daerah, termasuk di Sumatera Barat. Untuk memahami dinamika posisi politik Partai Golkar dalam Pemilu 2024, penting untuk terlebih dahulu meninjau tren perolehan kursi yang diraihinya dalam tiga pemilu terakhir.

Tabel 1.1
Perbandingan Perolehan Kursi Legislatif di Sumatera Barat Partai
Golkar

No.	Tahun	Perolehan Kursi
1.	2014	9
2.	2019	8
3.	2024	9

Sumber: *Data Olahan Peneliti*

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa Partai Golkar sempat mengalami fluktuasi jumlah kursi yang diraih di DPRD Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2014 partai ini memperoleh 9 kursi, menurun menjadi 8 kursi pada tahun 2019, namun berhasil kembali ke angka 9 kursi pada Pemilu 2024. Data ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi persaingan ketat antar partai politik, Partai Golkar mampu mempertahankan eksistensinya sebagai salah satu kekuatan politik utama di provinsi tersebut.

Selanjutnya, untuk mengetahui posisi Partai Golkar secara lebih spesifik dalam skema kompetisi di Dapil I DPRD Provinsi Sumatera Barat, perlu dilihat sebaran perolehan suara antar partai politik. Hal ini membantu memetakan konteks persaingan yang dihadapi oleh para calon legislatif, termasuk dari Golkar.

Tabel 1.2

**Perolehan Suara Partai Politik Pemilihan Calon Legislatif Daerah Pilihan 1
DPRD Provinsi Sumatera Barat**

No.	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Keadilan Sejahtera	97.135
2.	Partai Gerindra	83.644
3.	Partai NasDem	66.971
4.	Partai Amanat Nasional	39.763
5.	Partai Golkar	39.545
6.	Partai Demokrat	31.827
7.	PDI Perjuangan	23.542
8.	Partai Kebangkitan Bangsa	21.656
9.	Partai Persatuan Pembangunan	16.565
10.	Partai Ummat	12.043
11.	Partai Bulan Bintang	7.851
12.	Partai Hati Nurani Rakyat	4.561
13.	Partai Solidaritas Indonesia	4.008
14.	Partai Buruh	3.304
15.	Partai PERINDO	1.921
16.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.875
17.	Partai Garda Republik Indonesia	961
18.	Partai Kebangkitan Nusantara	803

Sumber: *KPU.go.id*

Tabel 1.2 di atas menjelaskan bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meraih suara tertinggi dengan 97.135 suara, disusul oleh Partai Gerindra dan Partai NasDem. Sementara itu, Partai Golkar berada di posisi kelima dengan 39.545 suara. Meskipun tidak berada di tiga besar, Golkar tetap berhasil mengamankan satu kursi legislatif di dapil ini. Fakta ini mengindikasikan bahwa terdapat faktor-faktor lain yang mendukung keberhasilan kader Golkar, salah satunya bisa dilihat dari siapa yang berhasil mendapatkan suara terbanyak dari internal partai.

Dalam hal ini, perhatian tertuju kepada salah satu calon legislatif muda, yaitu Muhammad Iqra Chissa Putra. Sebagai pendatang baru dalam kontestasi politik tingkat provinsi, pencapaiannya tergolong menonjol. Untuk memahami lebih lanjut capaian politiknya, perlu dilihat data perolehan suara para caleg Partai Golkar di Dapil I, terutama dalam perbandingan antara Pemilu 2019 dan 2024.

Tabel 1.3

**Perbandingan Perolehan Suara Calon Legislatif Partai Golkar Daerah
Pilihan 1 Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 dan Tahun 2024**

No.	Nama Calon Legislatif	Tahun 2019	Tahun 2024
1.	Muhammad Iqra Chissa Putra, S.S.T., M.M.	0	12, 461
2.	H. Afrizal, S.H., M.H.	6106	10, 031
3.	Dr. Amiziduhu Mendrofa, S.H., M.Hum.	0	3, 556
4.	Deviani, S.Si.	0	2, 728
5.	Linda Oktavianti, S.E., M.M., M.Pd.E.	0	1, 876
6.	Andi Mastian, S.E.	0	1, 844
7.	Richardo, S.P., M.M.	0	1, 256
8.	Devi Diany, S.H., M.H.	0	558
9.	Erwin Pribadi	0	421
10.	Aguswanto, S.P., M.P.	0	390

Sumber: *KPU. go. Id.*

Berdasarkan tabel 1.3 di atas, dapat dilihat bahwa Muhammad Iqra Chissa Putra memperoleh suara tertinggi di antara semua caleg Partai Golkar pada Pemilu 2024, yakni sebesar 12.461 suara. Ia bahkan mengungguli petahana seperti H. Afrizal, yang sebelumnya menjabat sebagai anggota DPRD periode 2019–2024. Data ini memperkuat anggapan bahwa Iqra Chissa mampu membangun basis dukungan politik yang kuat, meskipun secara usia dan pengalaman ia masih tergolong baru.

Untuk melihat sebaran dukungan yang lebih rinci, khususnya di basis utama pemilihnya yaitu Kota Padang, penting untuk menelusuri data perolehan suara Muhammad Iqra Chissa Putra di tingkat kecamatan. Hal ini memberikan gambaran lebih jelas tentang wilayah yang menjadi kantong suaranya

Tabel 1.4
Perolehan Suara Muhammad Iqra Chissa di Seluruh Kecamatan di Kota Padang dalam Pemilihan Umum Legislatif 2024

No.	Kecamatan	Perolehan Suara
1.	Padang Selatan	734
2.	Padang Timur	1.556
3.	Padang Barat	265
4.	Padang Utara	385
5.	Bungus Teluk Kabung	141
6.	Lubuk Begalung	1.515
7.	Lubuk Kilangan	684
8.	Pauh	2.715
9.	Kuranji	2.286
10.	Nanggalo	430
11.	Koto Tangah	1.750

Sumber: KPU. go. id.

Tabel 1.4 menyajikan data perolehan suara Muhammad Iqra Chissa Putra di sebelas kecamatan di Kota Padang. Kecamatan Pauh menjadi penyumbang suara terbanyak dengan 2.715 suara, diikuti oleh Kuranji (2.286 suara) dan Koto Tangah (1.750 suara). Ketiga kecamatan ini menjadi basis dukungan utama bagi Iqra Chissa dalam kontestasi legislatif. Sementara itu, Bungus Teluk Kabung merupakan wilayah dengan suara terendah, yakni 141 suara. Distribusi suara ini menunjukkan pola konsolidasi dukungan yang cukup kuat di daerah dengan jumlah pemilih besar, yang menandakan bahwa strategi dan jaringan politiknya cukup efektif dalam menjangkau pemilih. Ketiga kecamatan ini menjadi basis dukungan terbesar bagi Muhammad Iqra Chissa Putra dalam kontestasi legislatif kali ini.

Sementara itu, kecamatan dengan suara terendah adalah Bungus Teluk Kabung, yang hanya memberikan 141 suara, disusul oleh Padang Barat (265 suara) dan Padang Utara (385 suara). Pola persebaran suara yang didapat Muhammad Iqra Chissa Putra menunjukkan indikasi bahwa modal sosial yang dimilikinya

berpotensi memainkan peran dalam mengonsolidasikan dukungan di kecamatan dengan jumlah pemilih yang besar.

Berbagai elemen teridentifikasi berpotensi menjadi bagian dari modal, antara lain: rekam jejak kepemimpinan di organisasi seperti Ketua DPD Partai Golkar Kota Padang dan Ketua Umum BPD HIPMI Sumatera Barat jaringan sosial dan politik yang terbangun melalui aktivitas organisasi dan partai, serta adanya dukungan dari jejaring keluarga, termasuk hubungannya dengan Ketua DPD I Partai Golkar Sumatera Barat yang juga merupakan mertuanya. Keputusannya memilih Partai Golkar sebagai kendaraan politiknya pada saat partai tersebut sedang menunjukkan tren positif juga dapat dilihat sebagai langkah strategis dalam memanfaatkan momentum politik.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, peneliti berasumsi bahwa latar belakang pribadi, keterlibatan dalam organisasi, dukungan dari keluarga istri, serta aktivitas politik yang dijalankan merupakan bagian dari modal yang dimilikinya. Modal-modal tersebut diperkirakan menjadi alasan yang turut mendorong keberhasilannya dalam meraih kursi pada Pemilihan Legislatif DPRD Provinsi Sumatera Barat. Asumsi ini diperkuat oleh fakta bahwa Muhammad Iqra Chissa Putra terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Golkar Kota Padang dalam Musda X Partai Golkar pada 13 Februari 2021, dan menerima langsung bendera kepemimpinan dari Sekretaris Golkar Sumbar, Desra Ediwan¹⁸. Selain itu, ia juga memiliki keterlibatan dalam organisasi kewirausahaan, yakni sebagai Ketua BPD

¹⁸ Mario Sofia Nasution, 2021, "Iqra Chissa Terpilih Secara Aklamasi Pimpin Golkar Padang," https://www.antaranews.com/berita/1998053/iqra-chissa-terpilih-secara-aklamasi-pimpin-golkar-padang#google_vignette, diakses pada 16 April 2025 pukul 01.36.

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Sumatera Barat sejak dilantik pada 18 Desember 2017 oleh Ketua Umum BPP HIPMI, Bahlil Lahadalia.¹⁹

Di sisi lain, dukungan dari keluarga istri juga menjadi faktor penting. Iqra Chissa menikah dengan Zilga Ekha Regina, putri dari Bupati Solok Selatan, Khairunas, yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Golkar Sumbar, pada 26 Juni 2021.²⁰ Hubungan ini memperkuat jaringan politik dan sosialnya, terutama di wilayah Solok Selatan dan internal Partai Golkar Sumatera Barat. Keseluruhan latar belakang ini menunjukkan bahwa Muhammad Iqra Chissa Putra memiliki modal yang cukup kuat, baik secara struktural maupun kultural, dalam mendukung pencalonannya dan keberhasilannya meraih suara pada Pemilu 2024.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab apakah modal simbolik yang dikonversi menjadi modal sosial oleh Muhammad Iqra Chissa Putra memiliki pengaruh terhadap kesuksesannya dalam meraih kursi di pemilihan legislatif DPRD Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024. Oleh karena itu adapun pertanyaan dari penelitian ini yakni "Bagaimana pemanfaatan modal simbolik menjadi modal sosial yang dimiliki oleh Muhammad Iqra Chissa Putra dalam kontestasi Pemilihan Legislatif DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024??".

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis pemanfaatan modal oleh Muhammad Iqra Chissa Putra dalam Pemilihan Legislatif DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

¹⁹ Administrator, 2017, "Sah! Iqra Chissa Pimpin Hipmi Sumbar, Bahlil: Ini Sudah Konstitusional," *Harian Haluan*, 2017, <https://www.harianhaluan.com/sumbar/pr-10204441/sah-iqra-chissa-pimpin-hipmi-sumbar-bahlil-ini-sudah-konstitusional>, diakses pada 16 April 2024 pukul 01.46 WIB.

²⁰ Hendra Efison, 2021, "Menteri Saksi Nikah, M Iqra Chissa Persunting Anak Bupati Solse," *Padang Ekspres*, <https://padek.jawapos.com/sumbar/2363743734/menteri-saksi-nikah-m-iqra-chissa-persunting-anak-bupati-solse>, diakses pada 16 April 2024 pada pukul 02.03 WIB.